



## EKSPOR DAN DAYA SAING

### Pendahuluan

Ekspor sangat penting bagi perekonomian Indonesia untuk dua hal, yakni sebagai sumber utama devisa yang diperlukan terutama untuk pendanaan impor kebutuhan industri dalam negeri (bahan baku, komponen, dan barang-barang modal serta perantara) dan masyarakat (barang-barang jadi), dan sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, yang berarti juga peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan. Peran ekspor yang sangat krusial ini disadari oleh pemerintah Indonesia sejak era Orde Baru, walaupun pada waktu itu awalnya perhatian lebih diberikan pada pertumbuhan ekspor komoditas-komoditas primer, khususnya minyak dan gas. Pada saat itu, tingkat diversifikasi (pasar maupun produk) dan pendalaman ekspor nasional masih sangat lemah. Namun, sejak berakhirnya era *oil boom* pada awal dekade 80-an, mulai ada perhatian terhadap perkembangan ekspor non-primer, khususnya manufaktur, yang ditandai oleh pergeseran di dalam strategi industrialisasi dari kebijakan substitusi impor ke kebijakan promosi ekspor. Krisis keuangan Asia pada periode 1997-98 dan ketidakstabilan harga-harga dari sejumlah komoditas primer di pasar internasional semakin memaksa pemerintah Indonesia untuk lebih memfokuskan perhatian pada perkembangan ekspor manufaktur.

Namun hingga saat ini, berdasarkan laporan tahunan dari WTO dan UNCTAD, Indonesia sebagai sebuah ekonomi besar (dalam arti kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia) masih belum mampu menjadi bagian dari sepuluh besar negara-negara eksportir dunia. Misalnya berdasarkan data WTO (2010) China yang lebih belakangan memulai pembangunan ekonominya menduduki posisi teratas dengan nilai total ekspornya tercatat mencapai 1.202 miliar dollar AS atau menyumbang sekitar 9,6 persen dari nilai total ekspor dunia, disusul kemudian oleh Jerman di posisi kedua, Amerika Serikat (AS) di posisi ketiga, dan Jepang di posisi keempat. Sementara Indonesia berada di peringkat ke 30 dengan nilai total ekspornya hanya 120 miliar dollar AS atau pangsa dunianya hanya 1 persen. Bahkan di dalam kelompok ASEAN, Indonesia bukan negara eksportir terbesar. Pada tahun 2008, misalnya, Indeks Intensitas Ekspor Indonesia 3,54, yang adalah terendah setelah Viet Nam dengan 2,91. Sedangkan Malaysia 4,61 dan Thailand 4,04 (Widyasanti, 2010). Juga di lihat dari diversifikasi produk-produk ekspor menurut teknologi, Indonesia masih lemah, karena hingga saat ini produk-produk manufaktur sebagai ekspor unggulan Indonesia masih sama saja



## Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme

---

seperti dekade-dekade sebelumnya, yakni tekstil dan pakaian jadi, produk-produk dari kulit termasuk alas kaki, dan produk-produk dari kayu, bambu dan rotan, termasuk meubel (Tambunan, 2011a,b).

Kinerja Indonesia yang masih relatif buruk dalam ekspor, terutama ekspor manufaktur, membuat banyak kalangan pesimis akan kemampuan Indonesia untuk unggul, atau bahkan untuk dapat bertahan, di dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia saat ini dan ke depan. Rasa pesimis ini diperkuat dengan hasil simulasi dari banyak penelitian (antara lain, Feridhanusetyawan, dkk., 2000; Feridhanusetyawan dan Pangestu, 2002; Oktaviani, dkk., 2008) yang memang menunjukkan bahwa Indonesia adalah pihak yang dirugikan, atau paling tidak bukan ekonomi yang paling diuntungkan dari era perdagangan dunia tanpa hambatan. Juga penelitian-penelitian (antara lain, Pambudi dan Chandra, 2006; Hutabarat, dkk., 2007; Tambunan dan Suparyati, 2009) mengenai keuntungan yang Indonesia bisa dapatkan dari kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN dengan China (CAFTA) tidak memberikan alasan yang kuat untuk optimis. Sekarang pertanyaannya adalah: faktor-faktor apa saja yang selama ini menjadi penghambat utama perkembangan ekspor Indonesia, khususnya dari sektor manufaktur? Apakah karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung atau yang menciptakan distorsi pasar, atau karena faktor-faktor lainnya yang tidak dipengaruhi langsung oleh kebijakan-kebijakan ekonomi (seperti kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, kebijakan industry, kebijakan pertanian, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal)?

Tujuan utama dari *policy paper* ini adalah untuk mencoba menjawab pertanyaan tersebut di atas yakni menganalisis faktor-faktor yang menentukan tingkat daya saing ekspor Indonesia, dengan memberi perhatian khusus pada kebijakan perdagangan (khususnya ekspor) dan kebijakan-kebijakan lainnya yang mempengaruhi secara tidak langsung kinerja ekspor Indonesia.

### **Faktor-faktor Penentu Daya Saing dan Kinerja Ekspor**

Pertumbuhan dan perkembangan (diversifikasi pasar serta produk dan pendalaman) ekspor dipengaruhi secara bersamaan oleh banyak faktor, yang menurut sifatnya (endogen/bisa dikontrol *versus* eksogen/tidak bisa dikontrol) bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni faktor-faktor di sisi permintaan dan faktor-faktor di sisi penawaran (Gambar 1). Faktor-faktor di sisi permintaan bersifat eksogen bagi Indonesia, termasuk perubahan harga di pasar internasional untuk semua produk yang Indonesia ekspor. Karena menurut laporan tahunan dari WTO, berdasarkan sumbangannya terhadap nilai total ekspor dunia, Indonesia hingga saat ini tidak termasuk negara-negara eksportir penting untuk hampir semua barang dan jasa yang diperdagangkan secara internasional. Jadi dalam perdagangan

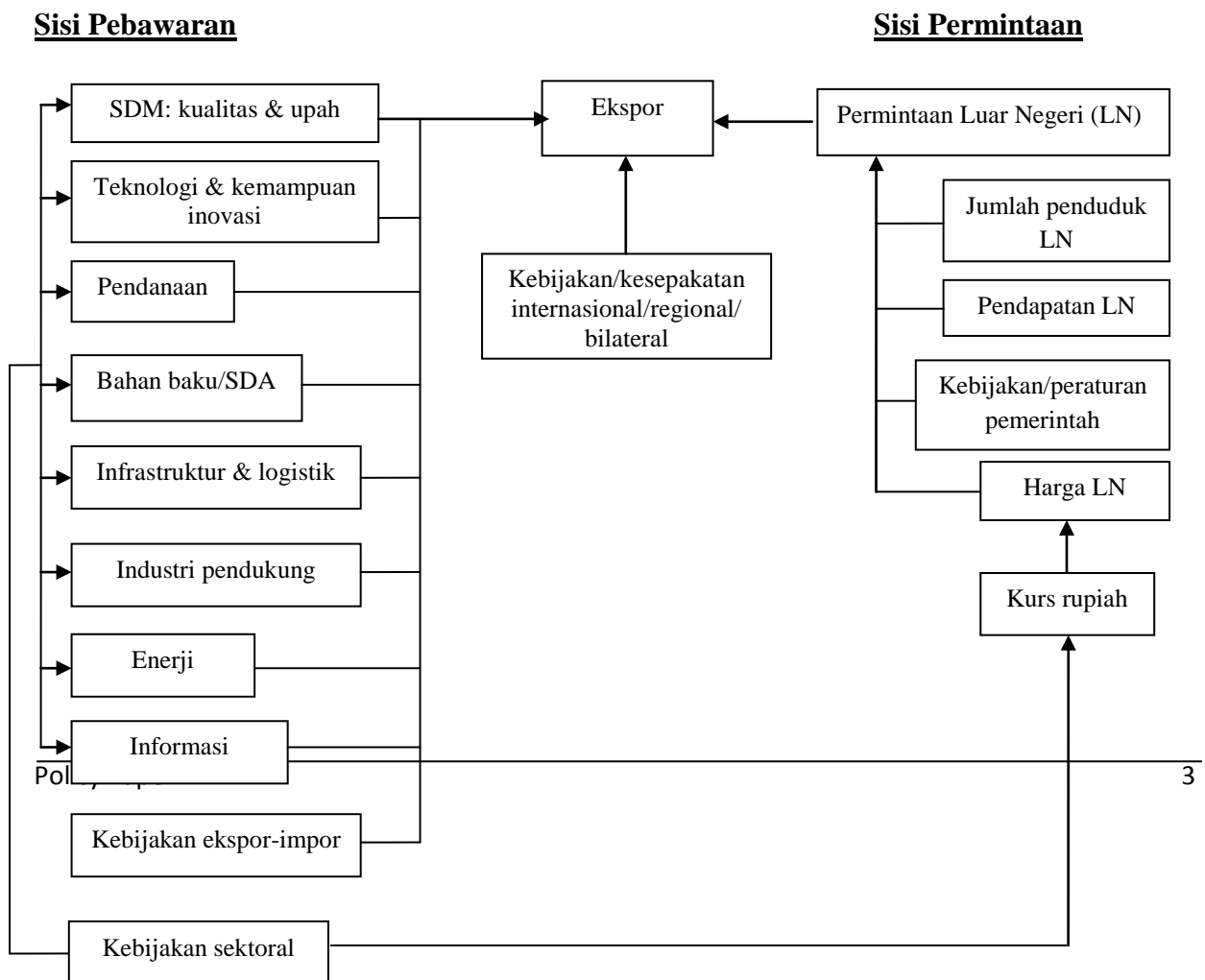


Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate  
(ACTIVE) Programme

dunia, Indonesia bukan penentu harga, melainkan *price taker*. Pemerintah Indonesia hanya bisa mempengaruhi harga dalam mata uang asing dari produk-produk ekspor Indonesia lewat perubahan kurs rupiah (devaluasi atau revaluasi).

Faktor-faktor yang bersifat endogen bagi Indonesia adalah dari sisi penawaran yang meliputi sumber daya manusia (SDM), ketersediaan/penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi di tingkat perusahaan, pendanaan yakni ketersediaan pinjaman dan skimming pendanaan ekspor dan impor dari sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya, ketersediaan bahan baku bukan hanya dalam arti jumlah tetapi juga kualitas dan harga (walaupun untuk faktor satu ini sifat endogennya terbatas), infrastruktur dan logistik dalam kuantitas dan kualitas, pembangunan industri-industri pendukung yang membuat komponen, barang-barang modal dan perantara dan mengolah bahan baku (di dalam model “berlian” mengenai konsep daya saing ekonomi dari M. Porter, industri pendukung termasuk diantara empat pilar utama daya saing), energi dalam kuantitas, kualitas dan harga, ketersediaan informasi, dan kebijakan khusus ekspor.

**Gambar 1: Faktor-faktor Penentu Daya Saing dan Kinerja Ekspor  
di Tingkat Makro (Negara)**

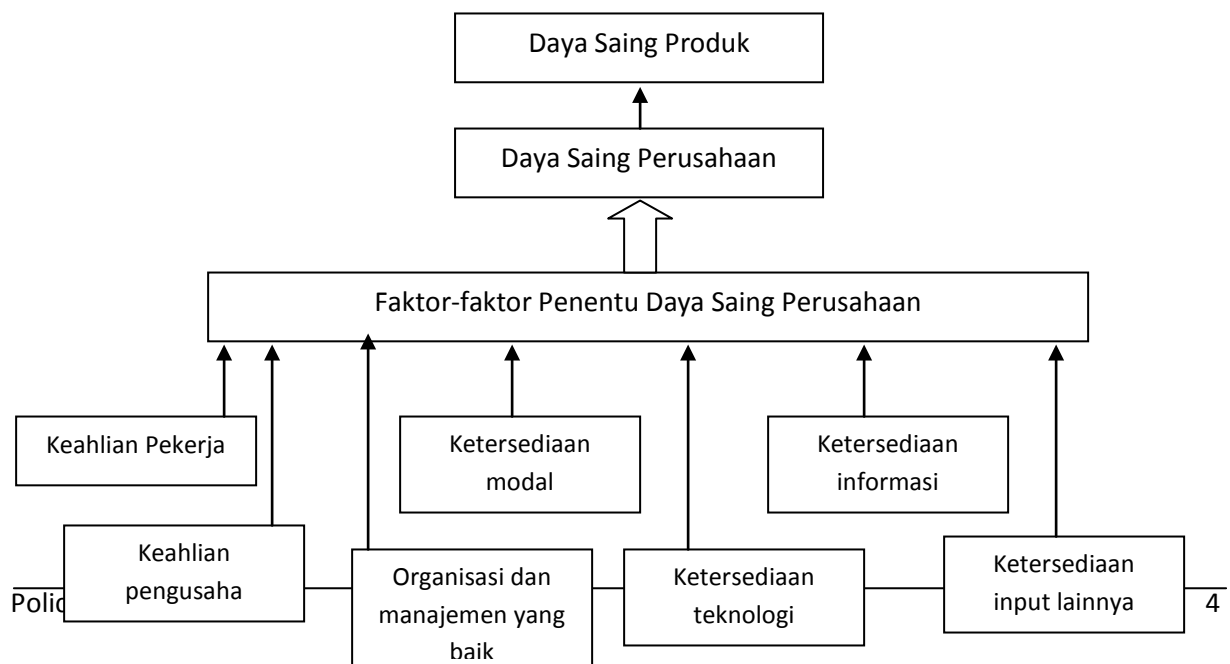




Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate  
(ACTIVE) Programme

Yang membuat faktor-faktor di sisi penawaran ini semakin kompleks dari sudut pandang kebijakan pemerintah adalah bahwa masing-masing dari faktor-faktor tersebut mewakili sektor masing-masing, dan ini berarti berbagai kebijakan sektoral secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap tingkat daya saing dan kinerja ekspor. Misalnya dalam hal SDM: kebijakan dari Kementerian Pendidikan turut serta mempengaruhi ketersediaan pekerja-pekerja terampil siap pakai bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Demikian juga, UU Perburuhan sangat mempengaruhi kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia yang berarti juga daya saing perusahaan-perusahaan eksportir, khususnya yang padat karya, seperti industri tekstil dan pakaian jadi dan industri alas kaki. Demikian juga kebijakan moneter, misalnya dalam penentuan suku bunga pinjaman atau nilai tukar rupiah, sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekspor. Tingkat suku bunga yang terlalu tinggi membuat biaya produksi meningkat yang berarti mengurangi daya saing harga dari ekspor Indonesia, yang selanjutnya menurunkan permintaan dunia terhadap ekspor Indonesia. Nilai tukar rupiah yang terlalu tinggi juga membuat daya saing harga dari ekspor Indonesia menurun relatif dibandingkan harga dari produk yang sama buatan negara lain.

**GAMBAR 2: DAYA SAING PRODUK DAN FAKTOR-FAKTOR UTAMA PENENTUNYA DI TINGKAT PERUSAHAAN**





## Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme

---

Selain dibedakan menurut sifatnya seperti yang diuraikan di atas tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat daya saing dan kinerja ekspor bisa juga dibedakan menurut tingkatnya, yakni pada tingkat makro dan tingkat mikro. Di tingkat makro adalah yang telah dibahas tersebut di atas, yakni faktor-faktor di sisi permintaan dan sisi penawaran yang mempengaruhi daya saing dan kinerja ekspor nasional secara keseluruhan. Sedangkan di tingkat mikro adalah mengenai daya saing ekspor dari sebuah perusahaan secara individu. Tingkat daya saing sebuah perusahaan tercerminkan dari tingkat daya saing dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dalam gilirannya, daya saing dari perusahaan tersebut ditentukan oleh banyak faktor, tujuh diantaranya yang sangat penting adalah: keahlian atau tingkat pendidikan pekerja, keahlian pengusaha, ketersediaan modal, sistem organisasi dan manajemen yang baik (sesuai kebutuhan bisnis), ketersediaan teknologi, ketersediaan informasi, dan ketersediaan input-input lainnya seperti energi, bahan baku, dan lainnya (Gambar 2).

Dua faktor pertama tersebut adalah aspek SDM, yang mana, keahlian pekerja tidak hanya dalam teknik produksi (antara lain disain produk dan proses produksi), tetapi juga teknik pemasaran dan dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Sedang keahlian pengusaha terutama adalah wawasan bisnis, dan yang dimaksud di sini adalah wawasan mengenai bisnisnya dan juga lingkungan eksternalnya (antara lain perkembangan saat ini dan ke depan dari pasar ekspor yang dilayani dan juga dari pasar-pasar ekspor lainnya yang belum dilayani, kondisi persaingan (termasuk calon-calon pesaing yang akan muncul), dan segala macam peraturan pemerintah atau dunia (seperti dalam konteks World Trade Organisation (WTO) dalam perdagangan internasional) mengenai perdagangan, produksi dan investasi di bidang bisnisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan eksternalnya adalah kebijakan-kebijakan ekonomi umum seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan luar negeri, kecenderungan dari perubahan selera masyarakat, perubahan sosial-budaya yang bisa mempengaruhi dalam jangka panjang permintaan atau persepsi pembeli (masyarakat) terhadap produknya, dan lain-lain). Wawasan pengusaha yang luas juga sangat penting bagi inovasi, dan bukan lagi rahasia umum bahwa inovasi merupakan kunci utama daya saing. Bahkan banyak literatur menyatakan bahwa banyak faktor yang menentukan kemampuan perusahaan melakukan inovasi, diantaranya adalah kreativitas pengusaha, dan yang terakhir ini, pada gilirannya, ditentukan oleh wawasannya mengenai bisnis yang ditekuninya (Shahid, 2007).

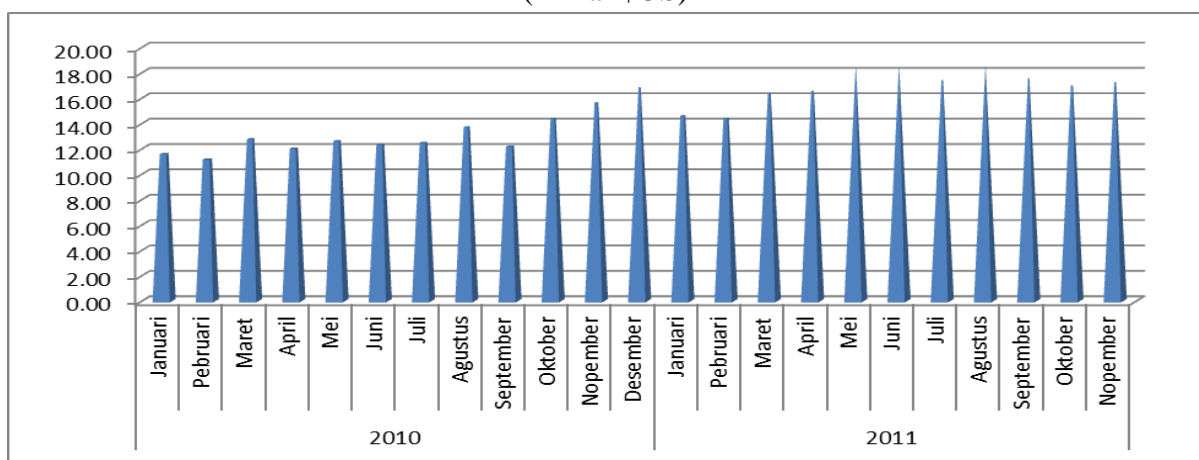
### **Kondisi Perkembangan Ekspor Indonesia: Beberapa Catatan**



## Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme

Badan Pusat Statistik pada bulan September 2011 mengumumkan ekspor non-migas pada bulan Juli 2011 tercatat sebanyak 13,26 miliar dollar AS, turun 7,93 persen dibandingkan Juni 2011, namun meningkat jika dibandingkan dengan nilai ekspor bulan Juli 2010. Namun kenaikan tersebut lebih disebabkan oleh kenaikan harga di pasar internasional, bukan penambahan volume permintaan dunia terhadap ekspor Indonesia.

Nilai Ekspor Indonesia Tahun 2010 – 2011  
(Miliar \$US)



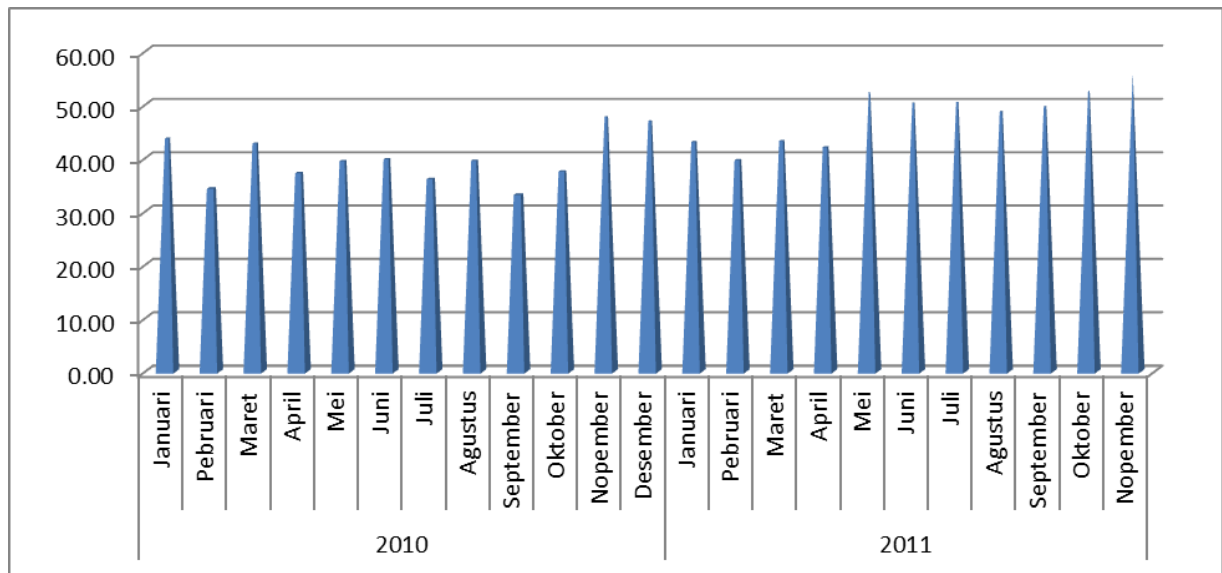
Sumber: BPS, 2010-2011

Menurut BPS, dalam kurun waktu 2006-2010 peningkatan volume ekspor non-migas Indonesia hanya 46,4 persen, lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan dari sisi nilai yang tercatat mencapai sekitar 56,5 persen (Kompas, Ekonomi, Rabu, 7 September 2011, halaman 17). Jadi sebenarnya ada masalah di sisi suplai dari ekspor Indonesia, yakni masih banyaknya faktor yang menghambat laju peningkatan volume ekspor non-migas nasional.



Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate  
(ACTIVE) Programme

Volume Ekspor Indonesia Tahun 2010 – 2011  
(Juta ton)



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) [20-01-2012] diolah

Hasil pendugaan dengan metode OLS (model double log) menunjukkan bahwa ekspor ( $x$ ) Indonesia sangat dipengaruhi oleh harga ekspor ( $p$ ) dan nilai tukar (*exchange rate*,  $e$ ), signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Secara ekonomi terlihat bahwa respon perubahan nilai tukar terhadap perubahan ekspor Indonesia adalah elastis. Sistem perdagangan Indonesia sebaiknya diberikan suatu mitigasi ekspor, karena krisis Eropa telah mulai terlihat dampaknya pada sektor keuangan. September tahun 2011 lalu, sektor keuangan Indonesia mengalami tekanan sehingga nilai tukar rupiah cenderung melemah terus terhadap mata uang dollar AS, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kinerja ekspor Indonesia.

$$\hat{x} = 41.420 + 0.716 p - 2.252 e - 0.052 k \quad R^2 = 0.774; \text{ Adj } R^2 = 0.752$$

(1.543) (-7.161) (-0.383)

Sedangkan kebijakan pelarangan ekspor ( $k$ ), secara statistik tidak berbeda nyata dengan nol, tetapi secara ekonomi menurunkan ekspor. Kebijakan pelarangan ekspor untuk *row-material* secara ekonomi menurunkan nilai ekspor Indonesia. Hal ini ditandai dengan beberapa peraturan Menteri seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri No: 07 Tahun 2012 terkait peningkatan nilai tambah mineral dan larangan untuk mengekspor produk-produk pertambangan jenis tertentu dalam kondisi mentah (raw



## Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme

---

material). Produk pertambangan tertentu dalam kondisi mentah tidak boleh diekspor atau dijual keluar negeri, yang diharapkan akan dapat menguntungkan bagi daerah dan Negara. Peraturan tersebut mewajibkan setiap jenis komoditas tambang mineral logam dan bukan logam tertentu wajib diolah atau dimurnikan, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kasus lainnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI No: 36/M-DAG/PER/8/2009, tentang Ketentuan Ekspor Rotan, dimana Pasal (1) ayat (2) menyebutkan bahwa (a) Rotan Asalan; (b) Rotan W/S dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit yang diameternya dibawah 4 mm dan diatas 16 mm; dan (c) Rotan W/S bukan dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit, dilarang untuk diekspor. Tentu saja hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, namun demikian pemerintah harusnya memberikan kelonggaran terkait dengan pelarangan ekspor raw material tersebut, karena selain sumberdaya manusia, modal, kita juga harus menyiapkan teknologi industri kita dalam rangka untuk mencapai tujuan peningkatan nilai tambah tersebut.

### **Permasalahan Ekspor Indonesia**

Secara umum beberapa hal yang menjadi permasalahan baru dan klasik bagi perkembangan kinerja ekspor Indonesia, berikut ini adalah uraiannya

#### ***Tingkat Diversifikasi yang Rendah***

Indonesia masih sangat lemah dalam diversifikasi produk maupun pasar, padahal ini merupakan salah satu syarat untuk bisa unggul dalam persaingan di pasar dunia yang semakin ketat. Konsentrasi pasar ekspor non-migas nasional hingga saat ini masih yang itu-itu saja; demikian juga ekspor Indonesia masih terkonsentrasi di sejumlah komoditas tertentu yang relatif sama seperti beberapa dekade yang lalu. Hingga saat ini negara-negara tujuan utama ekspor non-migas Indonesia masih yang sama juga seperti Jepang, China, Amerika Serikat (AS), dan India. Misalnya, dari tahun 2006 hingga 2010, Jepang masih diperingkat pertama sebagai pasar utama ekspor non-migas Indonesia, yang nilainya naik dari 12.199 juta dollar AS ke 16.497 juta dollar; sedangkan pada tahun 2011 China mengambil posisi Jepang menjadi peringkat pertama dengan nilai 17.136 juta dollar AS. Pada tahun 2006, AS di posisi kedua dengan nilai 10.683 juta dollar AS dan pada tahun 2011 turun ke posisi ketiga dengan nilai 13.223 juta dollar AS (Kompas, Ekonomi, Sabtu, 4 Januari 2012, halaman 18). Hingga saat ini belum ada peningkatan yang berarti dari ekspor non-migas Indonesia ke pasar lain seperti Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin.

Hasil penelitian dari Basri dan Rahardja yang dikutip oleh harian Kompas (Opini, Selasa, 27 Juli 2010, halaman 7) menunjukkan bahwa indeks konsentrasi ekspor Indonesia (*Herfindahl index*) mengalami peningkatan sejak tahun 2003. Ekspor Indonesia masih





## Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme

---

terkonsentrasi pada komoditas-komoditas primer. Mereka menyimpulkan bahwa ada tiga penyebab utama pola ekspor nasional seperti ini, yakni apresiasi riil dari nilai tular rupiah yang membuat daya saing harga dari ekspor manufaktur Indonesia relatif rendah; kurang inovasi (yang diantaranya kurang dukungan dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga R&D), dan masalah pendanaan ekspor.

Ekspor manufaktur Indonesia juga masih didominasi (sekitar 34 persen) oleh mesin dan peralatan listrik, karet, pakaian jadi, serta minyak hewan/nabati. Sementara produk-produk andalan Indonesia tersebut di pasar dunia kian mendapat pesaing yang semakin kuat dari sejumlah negara lain seperti China, Viet Nam dan India. Sejak tahun 2009, Viet Nam mulai menjadi pesaing ketat Indonesia dalam perdagangan pakaian jadi di pasar internasional. Bahkan, Viet Nam lebih maju dalam diversifikasi pasar, yakni mulai menjual ke pasar di luar Asia dan Amerika. Menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pangsa Viet Nam di impor Uni Eropa (UE) untuk pakaian jadi sekitar 1,26 persen dengan nilai 3,6 miliar euro, sedangkan pangsa Indonesia 1,21 persen dengan nilai 3,46 miliar euro (Kompas, Ekonomi, Rabu, 7 September 2011, halaman 17).

Seperti telah dikatakan sebelumnya, ekspor Indonesia masih terkonsentrasi di komoditas-komoditas primer, termasuk pertanian. Namun demikian, Indonesia semakin tergeser dalam bersaing dengan negara-negara yang juga menghasilkan dan mengeksportir komoditas-komoditas pertanian yang sama. Menurut Rina Oktaviani (Kompas, Ekonomi, Senin, 31 Oktober 2011, halaman 19), daya saing ekspor Indonesia, termasuk pertanian semakin memburuk, dan Indonesia belum bisa memanfaatkan secara optimal adanya area perdagangan bebas (FTA) termasuk ASEAN dengan China. Menurutnya, kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan daya saing ekspornya adalah diantaranya mencakup buruknya infrastruktur fisik (kualitas maupun volume), kurangnya pasokan energi, ekonomi biaya tinggi di jalur distribusi, biaya pelabuhan yang besar, masalah kelembagaan/birokrasi yang masih kurang efisien, manajemen rantai pasok produk pertanian ekspor yang masih lemah, terbatasnya akses ke informasi, besarnya biaya peningkatan standar mutu, dan terbatasnya akses ke kredit bank dan sumber-sumber pendanaan lainnya.

Tekstil dan produk-produknya, termasuk pakaian jadi (TPT) merupakan salah satu ekspor tradisional Indonesia dari sektor manufaktur. Dengan pengalaman yang panjang dalam industri dan ekspor TPT, sebenarnya sekarang ini Indonesia harus menjadi salah satu eksportir besar TPT di dunia. Namun, sekarang ini Indonesia cenderung semakin tergeser oleh pendatang-pendatang baru di pasar internasional. Salah satu kendala serius yang dihadapi oleh industri TPT nasional yang sebenarnya sudah klasik adalah kondisi mesin yang sudah tua yang tidak bisa diharapkan bisa menghasilkan TPT dengan efisien dan berdaya saing tinggi. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Soetrisno, sulitnya mendapatkan pendanaan dari bank dan sumber-sumber formal pendanaan lainnya merupakan



## Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme

---

salah satu (kalau bukan utama) penyebabnya. Berdasarkan data dari The Japan Textiles Importers Association (Kompas, Bisnis & Keuangan, Selasa, 24 Februari 2009, halaman 18), dari total TPT yang diekspor ASEAN ke Jepang pada tahun 2008, nilai dari Indonesia tercatat sebanyak 135 juta dollar AS, sedangkan dari Myanmar, negara anggota yang jauh lebih kecil dan tingkat kemajuan ekonominya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia, tercatat sebanyak 133 juta dollar AS, Thailand 240 juta dollar AS, dan Viet Nam sangat tinggi mencapai 838 juta dollar AS.

### ***Keterbatasan Informasi***

Masalah lainnya yang juga sering disebut-sebut di media masa maupun seminar-seminar akademi adalah keterbatasan informasi, baik mengenai kondisi dan potensi pasar ekspor dan pasar input, maupun mengenai kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah dan kesepakatan-kesepakatan di tingkat regional (misalnya di dalam konteks ASEAN dan APEC) maupun internasional (misalnya WTO) mengenai perdagangan dan investasi antar negara. Belakangan ini salah satu perubahan di dalam negeri yang sering mengganggu kelancaran ekspor dan impor adalah perubahan kode komoditas. Dalam rangka mengharmonisasikan sistem pencatatan komoditas ekspor dan impor (HS) untuk memberikan keseragaman dalam penggolongan barang untuk penetapan tarif kepabeanan secara global, dan untuk menjembatani perbedaan sistem klasifikasi tarif antarnegara, serta untuk memudahkan pengumpulan, pembuatan, dan analisis statistik perdagangan, saat ini sekitar 30 persen (atau sekitar 25.000) kode komoditas telah berubah, yang mengacu pada buku tarif kepabeanan terbaru yakni tahun 2012 (Kompas, Ekonomi, Kamis, 16 Februari 2012). Perubahan kode ini tentu adalah sesuatu yang positif. Hanya saja masalahnya, informasi mengenai perubahan kode tersebut tidak sampai ke semua eksportir dan importir, sehingga membuat dokumen ekspor-impor banyak yang ditolak oleh pihak bea cukai karena salah menyebutkan kode HS. Dampak selanjutnya adalah tertahannya banyak barang dipelabuhan yang jelas merugikan pelaku bisnis bersangkutan. Juga perubahan tersebut menyulitkan banyak pengusaha yang pemahaman analisis berbeda baik antar individu pelaku usaha maupun antara pengusaha dan pihak bea cukai.

### ***Implementasi FTZ dan KEK yang Belum Optimal***

Implementasi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ), khususnya di pulau Batam, termasuk Bintan dan Karimun (atau BBK), yang sudah berjalan sejak awal April 2009 lalu, masih belum optimal. Bahkan banyak pengusaha, khususnya pelaku industri dan eksportir menilai bahwa regulasi pabean di BBK sangat rumit dan justru mempersulit atau memperlambat kelancaran usaha mereka. Banyak peraturan pemerintah, khususnya yang



## Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme

dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, yang maksud baik, namun di lapangan sering terjadi "kesemerawutan" akibat dua hal utama, yakni: tidak adanya koordinasi yang baik dari semua dinas pemerintah daerah terkait, dan kurangnya sosialisasi semua peraturan mengenai penerapan FTZ di BBK. Misalnya, Peraturan Pemerintah (PP) No.2/2009 yang mengatur barang-barang apa saja yang boleh masuk ke BBK dari luar wilayah yang bebas bea. Maksudnya baik agar tidak terjadi penyalah-gunaan fasilitas bebas bea tersebut untuk barang-barang yang bukan input bagi kegiatan industri di BBK. Namun menurut PP tersebut, setiap importir membuat sebuah daftar jenis-jenis barang dan volumenya yang akan diimpor selama satu tahun ke depan. Hal ini ternyata menyulitkan banyak industri khususnya industri-industri yang inputnya sangat beragam hingga 12 digit nomor kode HS. Misalnya perusahaan-perusahaan elektronik harus membeli dari luar wilayah mulai dari kabel, sekrup, hingga sirkuit terpadu (Kompas, Bisnis & Keuangan, 1 Juni 2009, halaman 21).

Pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di dalam negeri yang telah ditetapkan di hampir semua provinsi juga belum optimal. Secara potensial, pelaksanaan KEK yang optimal sangat membantu kemajuan ekspor Indonesia. Namun, disahkannya Undang-Undang KEK pada 14 September 2009 lalu tidak serta-merta membuat Indonesia menjadi salah satu negara favorit tujuan penanaman modal asing (PMA). Salah satunya adalah Indonesia masih terbelakang dalam membangun KEK dibandingkan negara-negara lain yang juga memiliki KEK, khususnya China, yang sudah merintis konsep KEK sejak dekade 70-an. Masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaan KEK adalah yang terkait dengan pembebasan lahan. Padahal salah satu fasilitas penting yang membedakan antara KEK dengan wilayah non-KEK adalah kemudahan memperoleh hak atas tanah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, bukan di dalam KEK namun di luar sekitar KEK, yang penting untuk menghubungkan KEK dengan sumber-sumber pasokan bahan baku dan pelabuhan-pelabuhan utama yang melayani perdagangan internasional (Kompas, Bisnis & Keuangan, Rabu, 30 September 2009, halaman 21).

### ***Kondisi Infrastruktur dan Logistik yang Buruk.***

Sudah banyak diskusi dan laporan yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu ekonomi yang buruk dalam hal infrastruktur dan logistik. Hasil survei tahunan mengenai daya saing global dari negara-negara di dunia dari World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa untuk periode 2011-2012, Indonesia berada di posisi ke 76 dari 142 negara yang disurvei. Berdasarkan opini para pimpinan perusahaan yang disurvei, keterbatasan infrastruktur (dalam arti volume dan kualitas) merupakan kendala utama bagi hampir 10 persen dari jumlah responden (85 pengusaha/manajer/ceo). Sangat mungkin sekali bahwa buruknya infrastruktur dan mahalnya logistik selama ini sebagai salah satu penyebab



## Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme

---

utama rendahnya daya saing dan kinerja ekspor non-migas (khususnya manufaktur) Indonesia. Menurut laporan di Harian Kompas (Ekonomi, Kamis 2 Februari 2012), sebesar 14,08 persen dari harga jual bertumpu pada beban biaya logistik, dan sekitar 66,8 persen adalah biaya transportasi, mulai dari angkut barang dari gudang hingga distribusi, dan besarnya beban biaya ini terutama karena kombinasi antara keterbatasan jalan raya dan fasilitas angkutan.

### ***Ketergantungan pada Impor Bahan Baku dan Komponen yang Tinggi***

Salah satu yang membuat Indonesia tidak bisa menikmati secara penuh hasil ekspor selama ini adalah besarnya ketergantungan pada impor bahan baku yang telah diolah, komponen, barang modal dan alat produksi. Satu bukti nyata adalah pada saat krisis keuangan Asia 1997/98. Secara teori, depresiasi rupiah yang sejak Agustus 1997 hingga Mei 1998 sudah melebihi 500 persen bisa membuat ekspor Indonesia meningkat secara signifikan. Tentu teori ini berlaku dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu ekspor lainnya mendukung. Namun fakta menunjukkan bahwa pada saat rupiah jatuh selama periode tersebut, ekspor Indonesia tidak mengalami peningkatan yang pesat, terutama manufaktur, dan hal ini disebabkan oleh kandungan impor yang sangat tinggi dari semua ekspor manufaktur Indonesia. Penyebab utama tingginya ketergantungan ekspor non-migas Indonesia pada impor adalah masih sangat lemahnya industri-industri pendukung di dalam negeri yang membuat komponen, mesin-mesin, alat-alat produksi dan bahan-bahan baku siap pakai.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan**

Diversifikasi ekspor baik produk maupun pasar tujuan harus terus diupayakan untuk mengurangi kerentanan ekspor Indonesia terhadap gejolak-gejoka ekonomi regional (seperti kelesuhan ekonomi di zona euro dan di AS) dan terhadap ketidakstabilan harga-harga komoditas primer di pasar internasional. Dukungan pemerintah terhadap upaya diversifikasi ekspor bisa dalam berbagai bentuk, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah (khususnya mencegah apresiasi riil rupiah yang terlalu besar yang menurunkan daya saing harga dari ekspor manufaktur Indonesia), stabilitas harga, dukungan dana dengan suku bunga murah terutama untuk peningkatan produksi dan inovasi, insentif untuk menstimulasi kerjasama antara universitas dan lembaga R&D dengan perusahaan-perusahaan eksportir, bantuan promosi untuk tujuan pasar-pasar baru (dukungan aktif dari perwakilan Indonesia/KBRI di negara-negara tujuan ekspor sangat diperlukan), keamanan dan kepastian hukum, dan perlindungan hak cipta.

Faktor-faktor yang selama ini menghambat kelancaran ekspor dan upaya peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia harus dihilangkan, seperti buruknya infrastruktur, keterbatasan fasilitas transportasi berkualitas tinggi dan efisien, tingginya biaya logistik,



## Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme

---

kelembagaan dan birokrasi pemerintah yang masih belum efisien, jalur dan sistem distribusi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, pasokan energi yang sering terganggu, manajemen rantai pasok produk pertanian ekspor yang masih lemah, terbatasnya akses ke informasi, besarnya biaya peningkatan standar mutu, dan keterbatasan pendanaan dari perbankan.

Upaya sosialisasi kepada semua eksportir dan usaha-usaha terkait dari semua kesepakatan perdagangan bebas pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain seperti di dalam konteks AFTA dan APEC, maupun kesepakatan-kesepakatan di dalam WTO, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang mempengaruhi ekspor secara langsung maupun tidak langsung seperti harmonisasi sistem pencatatan komoditas ekspor dan impor (HS) perlu ditingkatkan lewat semua mode media yang ada, seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, surat edaran, website resmi, dan lainnya. Implementasi FTZ dan KEK perlu dioptimalkan. Segala rintangan yang menghambat kelancaran pelaksanaan FTZ dan KEK seperti pasokan energi yang sering terganggu, infrastruktur yang belum mencukupi, dan regulasi pabean yang masih rumit perlu segera dihilangkan.

Perlu keseriusan dalam membangun industri-industri pendukung ekspor untuk mengurangi ketergantungan industri-industri ekspor terhadap impor bahan baku siap pakai dan komponen. Pembangunan industri-industri pendukung harus menjadi salah satu komponen penting dari kebijakan promosi ekspor.

Perlu kebijakan promosi ekspor dengan pendekatan "*cluster*", yang mana terjalin kerjasama yang erat antar semua pihak terkait yakni perusahaan eksportir, perusahaan importir, bank dan lembaga keuangan lainnya, departemen pemerintah, distributor, lembaga promosi, media, universitas dan lembaga R&D, Kadin, asosiasi bisnis, pemasok bahan baku, energi dan input lainnya, penyedia transportasi, dan industri pendukung, dan lainnya

Usaha kecil dan menengah yang mempunyai potensi besar sebagai eksportir perlu mendapatkan perhatian khusus, antara lain memperbesar akses mereka ke fasilitas-fasilitas perdagangan, informasi (termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi), pendanaan, bahan baku, dan sumber-sumber inovasi (seperti kerjasama dalam R&D dengan universitas dan lembaga R&D), dan bantuan kegiatan promosi.

Kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang bersifat "*dadakan*" dan inkonsisten yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelancaran kegiatan ekspor dan daya saing ekspor Indonesia perlu dihilangkan.

Dalam rangka mengantisipasi dilaksanakannya peraturan tentang larangan ekspor raw material, sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada setiap industri terkait, agar perusahaan dalam hal ini dapat mempersiapkan diri, sehingga nilai ekspor dan tentu saja nilai tambah produk menjadi lebih besar. Karena persiapan tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat, maka disarankan kepada pemerintah untuk dapat memberikan kelonggaran waktu untuk beberapa jenis pengolahan produk tertentu.



Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate  
(ACTIVE) Programme

---

**Daftar Pustaka**

- Feridhanusetyawan, Tubagus dan Mari Pangestu (2002), 'Indonesian Trade Liberalization: Estimating the Gains', Working Paper 02.02, November, Adelaide: CIES, University of Adelaide,
- Feridhanusetyawan, Tubagus; Mari Pangestu; dan Erwidodo (2000), 'Effects of AFTA and APEC Trade Policy Reforms on Indonesian Agriculture', Working Paper 00.01, Oktober, Adelaide: CIES, University of Adelaide,
- Hutabarat, Budiman, M. Husein Sawit, Saktyanu K.D., Helena J. Purba, Wahida dan Sri Nuryanti (2007), 'Analisis Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia-China dan Kerjasama AFTA serta Dampaknya Terhadap Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia, Laporan Akhir dari Penelitian TA 2007, Bogor: Pusat Analisa Kebijakan Pertanian dan Ekonomi-Sosial, dan Lembaga Penelitian, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Oktaviani, Rina, Eka Puspitawati, dan Haryadi (2008), 'Impacts of ASEAN Agricultural Trade Liberalization on ASEAN-6 Economies and Income Distribution in Indonesia', Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, No. 51, Januari, Bangkok: UN-ESCAP.
- Pambudi, Daniel dan Alexander C. Chandra (2006), Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China terhadap Perekonomian Indonesia, Jakarta: Institute for Global Justice.
- Shahid, Yusuf (2007), "From Creativity to Innovation", Policy Research Working Paper 4262, Juni, Development Research Group, Washington, D.C.: World Bank.
- Tambunan, Tulus T.H. (2011a), "Indonesian Export and Competitiveness", Bahan Kuliah Kelas Unggulan, FE-Trisakti, Mei, Jakarta: Center for Industry, SME and Business Competition Studies, USAKTI
- Tambunan, Tulus T.H. (2011b), Perekonomian Indonesia. Kajian Teoretis dan Analisis Empiris, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tambunan, Tulus T.H. dan Agustina Suparyati (2009), "ASEAN-China Trade Liberalization Effect on Indonesian Agricultural Production and Trade", Policy Discussion Paper Series, No. 3/07/09, Center for Industry, SME & Business Competition Studies, University of Trisakti, Jakarta.
- Widyasanti, Amalia Adininggar (2010), "Do Regional Trade Areas Improve Export Competitiveness? – A Case of Indonesia", Bulletin of Monetary, Economics and Banking, Juli.
- WTO (2010), World Trade Report 2010. Trade in Natural Resources, Geneva: World Trade Organization.